

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PERENCANAAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA**

(Studi Kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh:
SINTA P. PRATIWI**

B200150193

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN,
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
APB DESA**

(Studi Kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SINTA P. PRATIWI

B200150193

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dra. Nursiam., MH., Ak., CA

NIDN: 0624096401

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA

(Studi Kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)

Yang ditulis oleh:

SINTA P. PRATIWI

B200150193

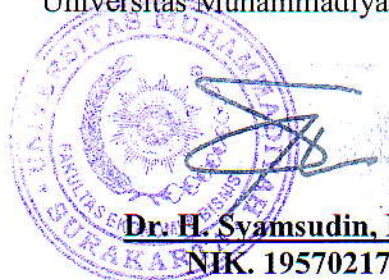
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 26 Agustus 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi isyarat

Dewan penguji:

1. Dra.Nursiam.,MH.,Ak.,CA
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Eko Sugiyanto, M.Si
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Fauzan, SE, M.Si,Ak,CA
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta


Dr. H. Syamsudin, MM.
NIK. 19570217

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 Agustus 2019

Penulis



SINTA P. PRATIWI

B200150193

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PERENCANAAN,
PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA**

(Studi Kasus Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan, pengelolaan ABD Desa, perbedaan antara Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, kendala serta peran pemerintah dalam adanya Permendagri No 20 Tahun 2018. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara Permendagri Tahun 2014 dengan Permendagri Tahun 2018 dilihat dari sisi struktur organisasinya, dan secara garis besar pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan sudah sesuai dengan Permendagri namun secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut disebabkan karena pemahaman perangkat desa yang belum sepenuhnya mengerti tugas dan adanya keterlambatan pembuatan RAK-Desa serta belum tepublikasikannya kepada masyarakat secara luas melalui media yang mudah di akses.

Kata Kunci: analisis peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018, pengelolaan keuangan desa

Abstract

The purpose of this study was to determine the readiness, management of the Village ABD, the difference between Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, constraints and the role of government in the existence of Permendagri No 20 of 2018. Types of Research In this study, using a qualitative approach, descriptive research type. The results of this study indicate that there are differences between Permendagri in 2014 and Permendagri in 2018 in terms of organizational structure, and in general village financial management in Pucangan Village is in accordance with Permendagri but technically there are still many obstacles. These constraints are caused by the understanding of village officials who do not fully understand the tasks and the delay in making RAK-Desa and have not yet been made public to the public at large through accessible media.

Keywords: analysis of Minister of Domestic Affairs regulation number 20 of 2018, village financial management

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan pengelolaan tersebut. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri tersebut desa semakin terbuka dan responsibilitas, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkannya secara transparan serta dilakukannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanafi 2015 dalam Liando, 2017).

2. METODE

2.1 Desain Penelitian

Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berasal dari hasil wawancara, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif. Metode deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2014:3).

2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah semua informan baik sebagai pelaku utama maupun orang lain yang dapat memberikan dan memahami informasi mengenai data yang akan diperlukan dalam penelitian ini. Subjek tersebut antara lain:

2.2. 1 Kepala Desa Pucangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

2.2. 2 Sekertaris Desa Pucangan selaku perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

2.2. 3 Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

2.2. 4 Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilaksanakan di Desa Pucangan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April 2019 sampai selesai.

2.4 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis memfokuskan terhadap pengelolaan keuangan pada Desa Pucangan apakah sudah sesuai dengan permendagri nomor 20 tahun 2018 terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.5 Prosedur Penelitian

Berikut ini prosedur penelitian menyangkut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

2.5. 1 Survei langsung ke objek penelitian di Desa Pucangan dengan wawancara.

2.5. 2 Mencari tahu masalah yang ada di objek tersebut (Desa Pucangan).

2.5. 3 Mengumpulkan data yang di ambil dari Desa Pucangan.(*Flowchat*/alur pengelolaan keuangan desa).

2.5.4 Mengolah data yang sudah di ambil lalu di teliti bagaimana proses pengelolaan sampai dengan pertanggung jawaban keuangan desa.

2.5.5 Pengambilan kesimpulan dan saran.

2.6 Sumber Data

Data yang dipakai pada penelitian ini adalah:

2.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden melalui *Interview* atau wawancara maupun observasi berupa identitas responden dan hasil tanggapan responden tentang bagaimana pengelolaan keuangan di Desa Pucangan. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah:

2.6.1.1 Wawancara, ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa. Informan dari unsur pemerintah desa sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala Urusan dan Kepala Seksi Desa Pucangan.

2.6.2 Data sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil penelitian lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini antara lain:

2.6.2.1 Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah- majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

2.6.2.2 Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.

2.6.2.3 Data-data pendukung yang diambil dari Desa Pucangan.

2.7 Instrumen Penelitian

Dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat bantu yaitu:

2.7.1 Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan peneliti. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.7.2 Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapatkan izin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

2.8 Metode Analisis

Metode analisis ini dimulai dengan langkah mengumpulkan dan menyaring keterangan-keterangan yang diperoleh secara menyeluruh dan detail, kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Adapun data-data yang diperoleh berupa teknis pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran tersebut selanjutnya dilihat apakah sesuai dengan Permendagri no 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, kemudian dianalisis penerapannya sehingga dapat di tarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Data dan Pembahasan Kesiapan Desa Pucangan Menerapkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Pengelolaan keuangan Desa mengalami perubahan, sebelumnya semua hal mengenai pengelolaan keuangan Desa tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, diperbarui menjadi Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk Desa dalam penerapannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di tandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Mei 2018. Hal ini seperti yang di sampaikan

oleh Bapak Budiyo sebagai berikut: *“Kan peraturan berlaku kita nggeh mengikuti, dalam arti amanat dari permendagri itu kan sudah ada, berlaku sejak tanggal ditetapkan, saya lupa tanggal ditetapkan itu bulan apa itu lupa saya.”* (Kepala Desa Pucangan, Senin 15 Juli 2019).

3.2 Analisis Data dan Pembahasan Pengelolaan Keuangan di Desa Pucangan Tahun 2019

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ada 5 tahapan yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan desa, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

3.2.1 Analisis Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Pucangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Perencanaan keuangan Desa Pucangan secara teknis sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada bab IV pasal 31 menjelaskan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang di anggarkan dalam APB Desa. Sekertais Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Di Desa Pucangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa berdasarkan RKP Desa dilakukan oleh staf Kaur Keuangan dan Kaur tata usaha dan perencanaan dengan Sekertaris Desa sebagai Koordinasi. Hal ini seperti yang di sampaikan langsung oleh Ibu Hapsari selaku Sekertaris Desa Pucangan sebagai berikut: *“Iya betul dia kan punya staf, staf nya itu terdiri dari kaur keuangan, kaur perencanaan dan kaur tata usaha dan umum.”* (Sekertaris Desa, Senin 15 Juli 2019).

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dibagi menjadi dua yaitu, RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa). Perencanaan desa yang telah ditetapkan dalam RPJM Desa

kemudian dijabarkan dalam RKP Desa menjadi dasar yang digunakan pemerintah desa dalam menyusun perencanaan keuangan yang berupa APB Desa.

Perencanaan keuangan Desa Pucangan secara teknis sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada bab IV pasal 32 ayat (1, 2, 3) menjelaskan bahwa Sekertaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD, dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Di Desa Pucangan dalam pembuatan Raperdes (Rancangan peraturan Desa) tentang APB Desa terlebih dahulu mempunyai RPJM (Rancangan Peraturan Jangka Menengah) lalu dijabarkan dalam RKP Desa (Rancangan Kerja Pembangunan Desa) yang dimulai dengan penggalan gagasan-gagasan dari setiap dusun melalui musyawarah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Pucangan Bp Budiyo sebagai berikut: *“Untuk rencana APBDes, Desa itu kan kita kan pertama harus punya RPJM ya mbak ya, yang sudah kita tetapkan. Dan kemudian kita harus menetapkan RKPDes rencana kerja pembangunan desa untuk tahun anggaran berjalan, setelah itu di implementasikan dalam APB Des tahun berjalan itu juga. Itu semua kan di proses melalui rapat-rapat ada penggalan dari masyarakat, kemudian di sampaikan ke BPD, kemudian kita sidangkan sama BPD setelah ada pengesahan baru dimintakan dipresentasikan di kabupaten, setelah semua oke baru kita postingkan baru kita eksekusi”*. (Kepala Desa , Senin 15 Juli 2019).

RKP Desa yang telah disepakati kemudian digunakan untuk membuat Raperdes tentang APBDesa. Dalam hal ini pembuatan Raperdes tentang APB Desa disusun oleh Sekertaris desa bersama tim penyusun Raperdes tentang APBDesa dimana Sekertarisdesa dibantu oleh perangkat desa yang dianggap berkompeten dalam pembuatan Raperdes tentang APBDesa dan Raperdes tentang APBDesa tahun anggaran 2018 sudah dibuat dan disepakati pada bulan Februari tahun selanjutnya. Hal ini tidak disampaikan secara detail oleh Sekretaris Desa Pucangan Ibu Hapsari Miftakhul R S.Farn , beliau hanya menyampaikan yang seharusnya dilaksanakan sebagai berikut: *“Raperdes tentang APB Des seharusnya kita*

melaksanakannya satu setahun sebelum tahun berjalan, semisalkan untuk APB Des 2019, kita sudah harus menyusun di bulan juli 2018”.(Sekertaris Desa, Senin 15 Juli 2019).

Raperdes tentang ABP Desa telah ditetapkan menjadi peraturan desa dan merupakan rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang memuat komponen utama berupa anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan selama 1 (satu) tahun anggaran serta memuat kebijakan anggaran dalam melakukan pembangunan desa. Sementara Raperdes tentang APBDesa di Desa Pucangan ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pucangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3.2.2 Analisis Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan di Desa Pucangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau penerapan dari APBDesa. Dalam proses pelaksanaan diantaranya termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran. Jika ditinjau dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pelaksanaan keuangan desa bab IV pasal 43 menjelaskan bahwa Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Dalam hal ini seecara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Pucangantelah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018kaitannya dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening desa. Hal ini diungkapkan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Ibu Mega Tamara Putri A,md sebagai berikut: *“iya mbak itu nanti biasanya ada pemasukan kaya pendapatan desa itukan harus dimasukan disetorkan ke desa dulu habis itu baru itu dikeluarkan dari rekening.”*(Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019).

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 selain mewajibkan untuk menggunakan rekening desa, Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Hal ini diungkapkan oleh Bendahara Desa Pucangan Ibu Mega Tamara Putri A, md sebagai berikut: *“Kalau disimpan tunai itu ada mbak tapi kan tidak boleh melebihi 10 juta kalau sekarang, kalau dulu peraturan yang tahun 2014 itu, itu maksimal 5 juta yang dipegang cash (tunai) sama bendahara tapi kalau untuk tahun ini 10 juta.”* (Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 45 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. Hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Desa Pucangan Bapak Budiyo, S.H dan Bendahara Desa Pucangan Ibu Mega Tamara Putri A, md sebagai berikut: *“hmm sudah mbak kalau kaur kasi kan kita posisikan di dalam PPKD petugas pelaksana kegiatan desa itu, yang mana di kita kan sudah di kasih aplikasi itu mbak ya aplikasi siskudes (sistem keuangan desa) yang dibuat oleh BPK gitu. Disana sudah muncul otomatis PPKD yang dipegang oleh kasi dan kaur itu, kan misalnya ada kegiatan tertentu itu nanti PPKD masuk mana gitu, disana itu udah otomatis, misalnya ada kegiatan yang sifatnya infrastruktur nanti PPKD yang menangani itu kasi kesejahteraan itu udah otomatis, bidang pemerintahan nah disana di dalam aplikasi akan muncul PPKD nya kasi pemerintahan, untuk pengelolaan penanganan rumah tangga muncul PPKD nya kaur umum dan kaur tata usaha udah otomatis.”* (Kepala Desa, Senin 15 Juli 2019) Lanjutan *“Kalau untuk menyusun DPA itu lama ii mbak paling gak tiga bulan atau empat bulan paling cepet dua bulan mbak, itu tergantung kita mendapat pendapatan dari kabupaten, provinsi, itu bulan apa baru kita bisa menyusun DPA itu rencana anggaran untuk desa.”* (Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 46 dan 47, menjelaskan bahwa Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DP. Dalam hal terjadi

perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Ibu Mega Tamara A,md sebagai berikut: *“Kalau untuk menyusun DPA itu lama ya mbak paling gak tiga bulan atau empat bulan paling cepet dua bulan mbak, itu tergantung kita mendapat pendapatan dari kabupaten, provinsi, itu bulan apa baru kita bisa menyusun DPA itu rencana anggaran untuk desa.”* lanjutan *“Kalau penyusunan DPA itu biasanya waktu penetapan ya mbak ya, penetapan APBDes tapi untuk menyusun kaya perbaikan itu biasanya ikut di APBDes perubahan jadi menunggu dari kabupaten itu di tetapkan ada perubahan, desa baru bisa menyusun DPA apa lanjutannya itu.”* (Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 50, sampai dengan pasal 56 menjelaskan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Dalam hal pelaksanaan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bendahara Desa Pucangan Ibu Mega Tamara p A,md terkait dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran dana: *“Iya mbak pasti tetap di cacat dalam kas umum sendiri”* Lanjutan *“Pembantunya ya kaya buku pembantu bank, pajak, panjar dan kaya definitif”* (Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019).

Berdasarkan kegiatan pelaksana harus mengajukan SPP yang nantinya akan diverifikasi oleh Sekdes dan disetujui oleh Kepala Desa. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bendahara Desa Pucangan Ibu Mega Tamara p A,md sebagai berikut: *“Kalau pengeluarannya itu harus itu mbak apa pelaksana kegiatan itu minta kaya SPP itu nanti di tanda tangani oleh kepala desa, sekertaris desa, bendahara, sama tim pelaksananya itu PPKD nya”*(Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019).

3.2.3 Analisis Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan di Desa Pucangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud ditutup setiap akhir bulan. Secara teknis penatausahaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.

Dalam hal penatausahaan di Desa Pucangan menggunakan buku-buku tersebut seperti yang diungkapkan Bendahara Desa Pucangan Ibu Mega Tamara P A,md sebagai berikut: *“Pembukuannya itu pembukuan kas umum, trus buku pajak, buku bank sama kaya panjar sama definitif (sudah pasti) itu aja mbak.”*(Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019) Lanjutan, *“iyaa setiap tahun kaya bulan desember akhir gitu biasanya ada pelaporan.”*(Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019).

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 65 Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

- 3.2. 3. 1 Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3.2. 3. 2 Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga

3.2. 3. 3 Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Pucangan Ibu Mega Tamara P A,md sebagai berikut: *“Penerimaannya itu nanti pihak ketiga bendahara, nanti bendahara menyetor melalui rekening.”*(Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019) Lanjutan *“Kaya penyewaan kios, itukan penyewaan kios biasanya kita disewa sama orang lain ya mbak ya, itu nanti jadi orang lain setiap bulan apa itu datang ke bendahara ngasih uang. Setelah itu bendahara langsung menyetorkan uang itu ke bank, jadi menyetor itu setelah penetapan APBDes sudah di sidangkan oleh BPD.”*(Bendahara Desa, Senin 15 Juli 2019).

3.2.4 Analisis Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan di Desa Pucangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Dalam melakukan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa secara teknis telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 68 dimana Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan ABP Desa yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pelaporan keuangan di Desa Pucangan untuk semester pertama belum di laporkan oleh Kepala desa kepada camat, dikarenakan laporan dari kaur dan kasi baru pada tahap pelaporan secara lisan.Hal ini seperti yang telah di jelaskan Kepala Desa Pucangan Bapak Budiyono S.H sebagai berikut: *“Pelaporan baru secara lisan ya setiap bulan kan kita melakukan koordinasi, mulainya kan kita melakukan koordinasi itu bagaimana progres kegiatan masing-masing kaur kasi. Setelah kemaren anggaran sudah kita cairkan semuanya dilaksanakan oleh PPKD itu dan kita kontrol baru secara lisan belum secara administrasi.”*(Kepala desa, Senin 15 Juli 2019)

3.2.5 Analisis Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan di Desa Pucangan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Bentuk lain dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah menginformasikan Laporan tersebut kepada masyarakat melalui media informasi. Hal ini seperti yang di jelaskan Kepala Desa Pucangan Bapak Budiyo S.H Sebagai berikut: *“Kalau pertanggungjawaban belum mbak nggeh, kalau awalnya sih kita barumelaporkan jenis kegiatan, sumber anggaran, dan pelaksanaannya kapan itu kemasyarakat lewat itu lewat apa namanya pembuatan MMT yang kita tempel- tempel di tempat strategis itu nggeh, sebenarnya kita punya website tapi belum sempat menginput disana.”* (Kepala desa, Senin 15 juli 2019).

3.3 Analisis Data dan Pembahasan Terkait Hal-hal yang Signifikan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Adanya pembaruan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentunya terdapat beberapa hal yang berbeda dari peraturan yang lama. Secara keseluruhan Tugas dan tanggungjawab para perangkat Desa seperti Kepala Desa, Sekertaris, dan juga Bendahara mengalami beberapa perubahan walaupun tidak secara drastis. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Budiyo S.H *“Kalau itu saya belum membaca secara komplit itu mbak antara permendagri yang 14 dan 18 ini, bagian yang mendasar bagian apa apa, kalau kita lebih menjurs ke yang pertanyaan secara detail dalam pengelolaan aja, gitu mawon nggeh.”* (Kepala

Desa Pucangan, Senin 15 Juli 2019). Penjelasan dari Ibu Hapsari R.S.Farm “*sejak diterapkan permendagri nomor 20 tahun 2018 tugas sekertaris desa itu, sebagai koordinator PPKD yaitu pelaksana perencanaan keuangan desa, PPKD terdiri dari sekertaris desa, kaur dan kasi dan kaur keuangan. Sebagai koordinator PPKD yaitu mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Des lalu mengkoordinasikan penyusunan rancangan APDes beserta perubahannya, lalu memverifikasi semua penerimaan dan pengeluaran dari APB Des, lalu mengkoordinasikan tugas dari kaur dan kasi lalu mengkoordinasikan penyusunan laporan.*”(Sekertaris Desa, Senin 15 Juli 2019). Penjelasan dari Ibu Mega P. A.Md “*Saya masuk di kantor desa pucangan ini kan dari tahun 2018 awal, jadi untuk peraturan setiap tahunnya itu berubah dari tahun 2018 tugas dan wewenang Kaur Keuangan itu tidak harus menjadi bendahara desa, jadi bendahara desa itu bisa Kasi atau Kaur lainnya. Sedangkan tahun yang ini permendagri yang baru, Kaur Keuangan melekat sama Bendahara Desa atau Bendahara Desa melekat dengan Kaur Keuangan.*”

3.4 Analisis Data dan Pembahasan Kendala dan Cara Mengatasi agar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Dalam penerapan peraturan tentunya terdapat kendala-kendala, apalagi untuk menyesuaikan penerapan dari Permendagri yang lama yaitu Nomor 113 Tahun 2014 ke peraturan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini seperti yang akan dijelaskan oleh masing-masing Perangkat desa sebagai berikut: Ibu Hapsari R.S.Farm “*Kalau permasalahan pasti selalu ada ya mbak ya, semisalkan kaur dan kasi itu harus berjalan sesuai dengan tuboksinya, tapi dengan berjalannya waktu terkadang tidak sesuai dengan tuboksi jadi kita harus pandai-pandai mengatur kasi dan kaur tersebut supaya bisa tetap menjalankan fungsinya sebagai PPKD tersebut.*” Selanjutnya Ibu Mega P. A.Md “*Kalau untuk mengatasi peraturan yang baru ini, masih tanya tanya ya mbak ya sama yang lebih senior untuk awalan itu pengawasan sama pelatihan itu tetep ada, itu biasanya ada pelatihan dari pemdes dari kabupaten.*” Lanjutan “*Itu biasanya diaplikasi mbak, di penatausahaan atau di anggaran-anggaran awal itu tetep ada*

perubahan ada aturan yang baru, atau bisa berubah rubah aplikasinya. Jadi kaya pelatihan di hotel mana itu dari awal penganggaran sampai penatausahaan.”

3.5 Analisis Data dan Pembahasan Terkait Dukungan Pemerintah dalam Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Adanya peraturan terbaru tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah yang harus ikut serta mendampingi dan memberikan pelatihan agar perangkat desa memahami maksud tujuan dan tugasnya masing-masing. Hal ini seperti yang di paparkan oleh Ibu Hapsari S.Farm *“Setiap ada peraturan baru dari pihak pemerintah pusat selalu mengadakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi perangkat desa yang terkait di dalam peraturan baru tersebut, sebelum pelaksanaan tugas selanjutnya pasti selalu ada pelatihan-pelatihan.”* Lanjutan *“Semisalkan dari permendagri 20 tahun 2018 setelah disahkan permendagri tersebut dari pemerintah kabupaten Sukoharjo mengundang perangkat yang terkait yang di dalamnya terkait dengan permendagri, semisalkan dari kepala desa, dari sekdes, dari kasi dan kaur kita diadakan pelatihan di Sukoharjo. Seperti itulah tugas dan wewenang dari masing-masing dan fungsinya, dan tiap-tiap kedudukan kan dilatih. Misalkan sekertaris nanti tugasnya seperti ini seperti ini, dari kaur keuangan nanti memegang siskudes caranya seperti ini seperti ini ada pelatihannya sendiri, sebelum kita melaksanakan terjun ke lapangan langsung.”* (Sekertaris Desa, Senin 15 Juli 2019)

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil olah data dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1.1 Pada tahap Kesiapan Desa Pucangan dalam penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, belum sepenuhnya siap dalam menerapkannya, namun Desa Pucangan berusaha untuk tetap mengikuti seluruh prosedur dan menerapkan pembaruan peraturan Permendagri tersebut pada saat peraturan tersebut disahkan yaitu pada tanggal 8 Mei 2018.

4.1.2 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

4.1.2.1 Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hanya saja terdapat ketidaksesuaian pada Raperdes tentang APB Desa yang baru di sepakati pada bulan Februari tahun selanjutnya, sedangkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dijelaskan bahwa Raperdes tentang APB Desa disepakati bersama paling lama bulan Oktober tahun berjalan. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap perencanaan di Desa Pucangan sudah dapat dikatakan sesuai.

4.1.2.2 Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pemerintah desa sudah melakukan pelaksanaan sesuai dengan peraturan. Dalam hal ini pemerintah Desa Pucangan tidak pernah meminta pungutan selain yang telah ditetapkan pada Perdes, dan belum pernah menganggarkan biaya bencana. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pelaksanaan di Desa Pucangan sudah dapat dikatakan sesuai.

4.1.2.3 Tahap penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hanya saja terdapat ketidaksesuaian pada pelaporan penutupan Buku kas umum oleh kaur keuangan kepada Sekertaris desa, di Desa Pucangan sendiri Kaur keuangan melaporkan penutupan Buku kas umum hanya 1 satu kali yaitu pada saat akhir tahun, sedangkan menurut Peraturan Nomor 20 Tahun 2018 pelaporan penutupan Buku kas umum di laporkan setiap akhir bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pelaksanaan di Desa Pucangan sudah dapat dikatakan sesuai.

4.1.2.4 Tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini dikarenakan untuk tahun ini 2019 belum genap setengah tahun berjalan sejak peneliti melakukan wawancara. Sehingga memang belum adanya

laporan baik untuk semester pertama maupun semester akhir. Maka berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pelaksanaan di Desa Pucangan belum dapat dikatakan sesuai.

4.1.2.5 Tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Pucangan belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal ini dikarenakan tahun 2019 ini belum genap setengah tahun berjalan sejak peneliti melakukan wawancara, selain itu untuk penginformasi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa secara tertulis melalui media juga belum terlaksana dikarenakan kurangnya Tenaga Ahli untuk menginformasikan melalui media seperti web, namun penginformasian kepada publik sudah dilakukan dengan menggunakan MMT (*Metromedia Technologies*). Maka berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tahap pelaksanaan di Desa Pucangan belum dapat dikatakan sesuai.

4.1.3 Perbedaan yang signifikan terkait dengan tugas masing-masing perangkat desa dengan adanya peraturan yang baru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4.1.3.1 Tugas Kepala Desa sendiri tidak mengalami perubahan yang signifikan, tugas utamanya masih menjadi PKPKD (Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa), yang nantinya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa.

4.1.3.2 Tugas Sekertaris mengalami perubahan yang signifikan jika pada Permendagri 2014 tugas Sekertaris Desa adalah menyusun Kebijakan pengelolaan ABD Desa dan menyusun Raperdes (Rancangan peraturan desa) perubahan dan pertanggungjawabannya, maka tugas Sekertaris Desa pada Permendagri 2018 adalah mengkoordinasi penyusunan tersebut kepada staf yang ada di bawahnya seperti Kaur keuangan, Kaur Urusan dan Ketua Seksi. Selain itu juga pada Permendagri tahun 2018 ada penambahan tugas untuk Sekertaris yaitu melakukan verifikasi terhadap DPA, DPAA dan juga DPAL.

- 4.1.3.3 Tugas Bendahara Desa mengalami perubahan yang signifikan, pada Permendagri tahun 2018 ini penggunaan kata Bendahara diganti menjadi Kaur Keuangan. Namun untuk tugas pokok masih sama yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- 4.1.4 Dalam setiap penerapan peraturan baru pastinya terdapat kendala-kendala yang harus diselesaikan, kendala tersebut diselesaikan dengan cara bertanya kepada yang lebih senior karena pengalaman-pengalaman yang mereka miliki dari peraturan yang lama, sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk penerapan peraturan yang terbaru ini. Hal ini dikarenakan kendala atau masalah yang muncul biasanya cenderung sama dari sebelumnya.
- 4.1.5 Adanya peraturan baru tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah, sehingga pemerintah wajib memberikan pelatihan-pelatihan untuk membekali wawasan para perangkat Desa yang menjadi pelaku utama dalam mengelola keuangan Desa. Hal ini diharuskan agar Perangkat Desa paham akan tugas tanggungjawab serta perubahan apa yang ada pada peraturan yang terbaru ini yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4.2 Keterbatasan

- 4.2.1 Peneliti tidak menanyakan secara detail dengan cara menggali informasi yang lebih mendalam kepada semua perangkat desa tentang kesiapan Penerapan Peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hanya menanyakan kesiapan Permendagri ini kepada Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- 4.2.2 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat lima tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, adanya ketidaksesuaian tahun yang ditanyakan oleh peneliti kepada perangkat desa mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian di tahap pelaporan.

- 4.2.3 Peneliti hanya menanyakan perbedaan yang signifikan dari tugas perangkat desa terkait dengan peraturan pengelolaan keuangan desa pada Permendagri tahun 2018 dan Permendagri Tahun 2014.
- 4.2.4 Adanya peraturan Permendagri terbaru tentunya terdapat kendala dan masalah, disini peneliti tidak secara detail menggali informasi terkait dengan masalah-masalah dan cara mengatasi masalah tersebut, sehingga hasil yang didapat hanya masalah umumnya saja.
- 4.2.5 Peneliti hanya menanyakan tentang dukungan dan peran pemerintah tanpa meminta bukti secara lengkap terhadap kegiatan pelatihan yang diberikan pemerintah sebagai dukungan atas adanya peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4.3 Saran

Bagi Peneliti selanjutnya:

- 4.3.1 Dapat menggali secara detail terkait dengan kesiapan Desa dalam penerapan Peraturan yang terbaru mengenai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- 4.3.2 Dapat membahas kesemua lima tahapan yang ada pada Permendagri No 20 Tahun 2018, serta mempersiapkan panduan wawancara secara detail agar tidak terjadi kesalahan tahun yang ingin dijadikan penelitian.
- 4.3.3 Dapat menggali lebih detail terkait dengan hal apa saja yang mengalami perubahan secara menyeluruh, bukan hanya tugas perangkat desa, tetapi mencakup semua aspek yang ada di dalamnya, seperti pengelolaan keuangannya dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.
- 4.3.4 Dapat menanyakan lebih luas terkait masalah apa saja yang ada, bukan hanya dari proses pengelolaan keuangannya tetapi kesemua tahapan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- 4.3.5 Diharapkan dapat meminta bukti nyata atas adanya pelatihan yang diberikan pemerintah kepada perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah Yeni Nur, 2019. *Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa*. Jurnal Litbang Sukowati 1 ISSN : 2580-541X | e-ISSN : 2614-3356

- Faridah,Bambang Suryono, 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 (2015)
- FerinaIka Sasti, et al, 2016. *Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa dalam Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol.14 No.3 2016.
- Husna Syaifatul, syukuriy Abdullah, 2016. *Kesiapan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas sesuai Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (studi pada beberapa Desa di kabupaten Pidie)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 282-29.
- Hartina, et al, 2017. *Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba)*. ISSN 2355-6439.
- Indrianasari Neny Tri, 2018. *Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono)*. E-ISSN : 2598-6074, P-ISSN : 2598-2885 Volume 2, Number 2, Juli 2018.
- Kadjudju Delyane et al, 2017. *Analisis penerapan peraturan menteri dalam negeri No 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBDes*.Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1), 2017, 160-168.
- Liando Leonardo Yosua,et al, 2017. *Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1474 –1483. ISSN 2303-1174.
- Mamuaya Jeacklin Valenia et al, 2017. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No113 Tahun 2014*. Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017, Hal. 1020 – 1030 ISSN:2303-1174.
- Mamelo Gresly Yuniuss Rainal,et al, 2016. *Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu*.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
- Rahmawati Hesti Irna. 2015 *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. University Research Colloquium 2015 ISSN: 2407-9189